

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL  
CONTENT SEBAGAI KEJAHATAN PEMBOHONGAN PUBLIK  
MAYANTARA (*CYBER CRIME*) PADA IKLAN PINJAMAN ONLINE  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (ITE)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**PUPUT REGINA CAYANI**

**20.10.0028**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS IBA**

**PALEMBANG**

**2024**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Puput Regina Cayani

NPM : 20.10.0028

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul : **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Ilegal  
Content Sebagai Kejahatan Pembohongan publik Mayantara  
(Cybercrime) Pada Iklan Pinjaman Online Berdasarkan  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE)”**

Palembang, 26 Juni 2024

Menyetujui,

PEMBIMBING I

H. YUDI FAHRIAN, S.H, M.Hum.

PEMBIMBING II

Hj. SAKINAH AGUSTINA, S.H, M.Hum

MENGETAHUI,

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG



IBRINIWAH, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puput Regina Cayani  
Tempat, tanggal Lahir : Palembang, 24 Mei 2002  
NPM : 20.10.0028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 26 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Puput Regina Cayani  
20.10.0028

## ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Ilegal Content Sebagai kejahatan Pembohongan Publik Mayantara (Cybercrime) Pada Iklan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE)**”. Tuntutan ekonomi dengan biaya hidup yang semakin tinggi adalah salah satu pemicu maraknya penggunaan pinjaman online di masyarakat. Berbagai cara penawaran dilakukan oleh perusahaan penyalur pinjaman online agar masyarakat tertarik, termasuk dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum seperti *illegal content* sebagai kejahatan pembohongan publik *Cybercrime*. Dari sinilah tumbuh permasalahan. Bagaimanakah implementasi sanksi pidana ilegal content pada iklan pinjaman online berdasarkan Pasal 43 ayat f dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang (ITE). dan Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi tindak pidana ilegal content pembohongan publik pada iklan pinjaman online Pasal 43 ayat f dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis normative.

Dari hasil penelitian sudah ada aturan yang mengatur tentang sanksi *illegal content* pembohongan publik pada iklan pinjaman online ilegal yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang (ITE) dalam penerapan aturannya sudah tepat, dimana dalam penerapannya menggunakan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* dalam hal ini UU ITE yang bersifat khusus. Sedangkan POJK No. 77/POJK.01/2016 dalam penerapannya masih belum cukup mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pinjaman online ilegal, sehingga perlu pembentukan undang-undang secara khusus yang mengatur pinjaman online ilegal. Sedangkan kendala dalam penerapan sanksi pembohongan publik pada iklan pinjaman online adalah masih banyaknya perusahaan pinjaman online ilegal yang melanggar aturan POJK No.77/POJK.01/2016 yang tidak mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK, selain itu proses penegakan hukum dalam koordinasinya antar lembaga juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi. Diharapkan dalam hal ini OJK mempunyai komitmen dalam memeberikan perlindungan kepada konsumen.

**Kata Kunci:** Penerapan sanksi, *Ilegal conten*, Pinjaman online

## ABSTRACT

This thesis is entitled "**Implementation of Criminal Sanctions for the Crime of Illegal Content as a Crime of Public Deception (Cybercrime) in Online Loan Advertisements Based on Law Number 19 of 2016 (ITE)**". Economic demands with increasing costs of living are one of the triggers for the widespread use of online loans in society. Various ways of offering are carried out by online loan companies to get people interested, including ways that are contrary to the law, such as illegal content as a crime of public deception, Cybercrime. This is where the problem grows. How are criminal sanctions implemented for illegal content in online loan advertisements based on Article 43 paragraph f in Financial Services Authority regulation Number 77 of 2016 and Law Number 19 of 2016 concerning (ITE). and What are the obstacles in implementing sanctions for illegal criminal acts containing public deception in online loan advertisements Article 43 paragraph f in Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 and Law Number 19 of 2016. In this thesis research the author uses legal research methods with a normative juridical approach.

From the research results, there are already regulations governing illegal sanctions for public deceptive content in illegal online loan advertisements, namely based on Law Number 19 of 2016 concerning (ITE), the application of the rules is correct, where the application uses the legal principle of *lex specialis derogat legi generalis* in This is the ITE Law which is special in nature. Meanwhile POJK no. 77/POJK.01/2016 in its implementation is still not sufficient to accommodate and resolve the problem of administering illegal online loans, so it is necessary to establish a law specifically regulating illegal online loans. Meanwhile, the obstacle in implementing sanctions for public deception in online loan advertisements is that there are still many illegal online loan companies that violate POJK regulations No.77/POJK.01/2016 and do not register their companies in accordance with the rules set by the OJK, in addition to the law enforcement process in Coordination between institutions can also be a factor that influences the effectiveness of sanctions implementation. It is hoped that in this case the OJK will have a commitment to providing protection to consumers.

**Keywords:** Application of sanctions, *illegal content*, online loans